

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Agraris yang artinya memiliki kekayaan yang berlimpah baik berupa rempah-rempah maupun hasil pertanian lain seperti padi, umbi-umbian jagung dan lain sebagainya yang membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, dan pertanian menjadi sektor yang paling diandalkan bagi Negara Agraris¹, kondisi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam tersebut yang menjadikan sebagian besar penduduk di Indonesia bermata pencarian sebagai petani, keberadaan petani menjadi penting bagi Negara Agraris untuk turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi di Indonesia masyarakat yang bermata pencarian petani cenderung hidup di bawah garis kemiskinan dikarenakan hasil produksi pertanian yang belum begitu memadai. Menurut pernyataan Hadisoepotroe² bahwa petani merupakan pelaku utama pembangunan pertanian termasuk dalam golongan ekonomi lemah, lemah dalam permodalan, penerapan teknologi dan juga lemah dalam semangat untuk maju. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pembangunan pada sektor pertanian mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan masih mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional hal tersebut dapat dilihat

¹ Riwanto Tirtosudarmo, *Batas-batas Rekayasa Sosial*. Jakarta, LIPI Press, 2010, hlm 10

² Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Afabeta, 2012, hlm. 109

dari besarnya jumlah angkatan kerja pada produksi pertanian dan kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang masih dominan berasal dari sektor pertanian³.

Sejarah Indonesia pernah menjadi Swasembada pangan pada tahun 1984 dengan angka produktivitas pertanian sebanyak 25,8 ton dan kesuksesan itu mendapatkan penghargaan oleh *FAO* (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985 berbagai usaha pemerintah digerakkan pada masa orde baru di masa pemerintahan Soeharto disebut dengan revolusi hijau atau yang lebih dikenal dengan “Panca Usaha Tani” untuk meningkatkan hasil panen petani. Perekonomian Indonesia dari sektor pertanian akan membuat Indonesia akan terus maju mengingat sebagian besar penduduk di Indonesia bermata pencarian sebagai petani, karena pertanian memegang beberapa hal penting dalam suatu Negara yaitu di bidang pangan, bahan pokok industri, sandang papan dan berfungsi juga untuk menyerap tenaga kerja sebagian masyarakat.

Pemerintah Indonesia mempunyai target ambisius kembali untuk menaikkan produktivitas beras dalam Negeri dan kembali menjadi Swasembada Pangan dengan produksi pertanian dari sekitar 70,6 juta ton di tahun 2014 menjadi 73,4 juta ton di tahun 2015 dan menjadi 82,1 juta ton pada tahun 2018, yang jika dapat dicapai maka Indonesia tidak lagi tergantung pada beras impor dari Negara lain upaya-upaya pemerintah untuk mencapai Swasembada Pangan ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan produktivitas, menurunkan kehilangan hasil produksi pertanian padi peningkatan mutu hasil produksi dan peningkatan areal tanam melalui peningkatan

³ Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021

infrastruktur irigasi (membangun jaringan irigasi baru seluas 1 juta ha dan merehabilitasi jaringan irigasi seluas 3 juta ha).Langkah nyata untuk mendukung inisiatif ini adalah pemerintah mengalokasikan Rp 1 triliun (sekitar US\$ 80,000,000) Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 untuk membiayai rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi provinsi dan kabupaten/kota.⁴ Salah satu program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produktivitas pertanian yaitu dengan Program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*), salah satu program IPDMIP yaitu pemberdayaan petani, Pemberdayaan (*empowerment*) petani akan berdampak luas terhadap pembangunan nasional, karena lebih dari 60% penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian, menurut Iskandar hampir 80% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, dengan demikian pembedayaan petani sangat penting untuk dilakukan karena menyentuh mayoritas penduduk Indonesia dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani⁵.

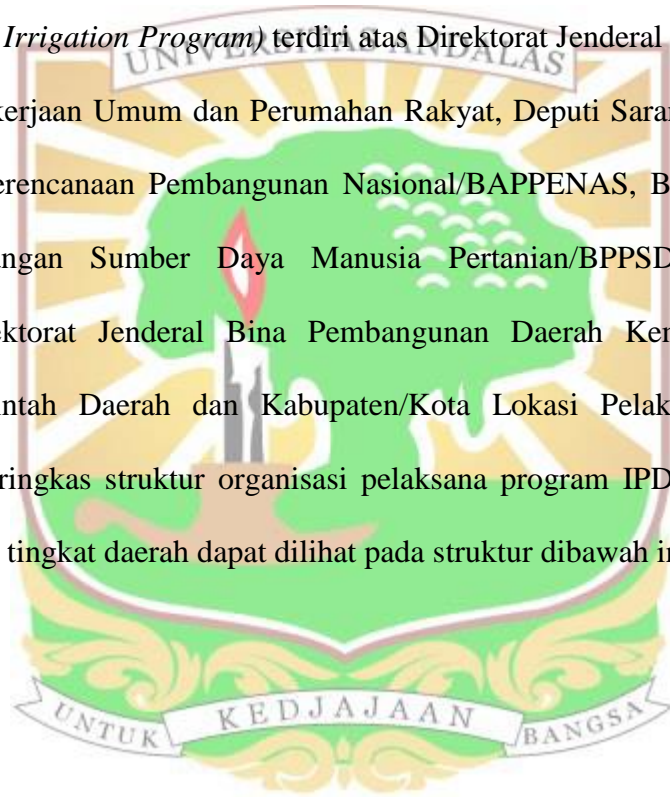
Program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) merupakan salah satu dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Sejalan dengan Undang-undang Nomor 17/2007 Tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) tahun 2005-2025, Undang-undang Nomor 18/2012 tentang Pangan, dan Undang-undang Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sasaran di atas, maka arah Kebijakan Umum Ketahanan Pangan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

⁴ Pedoman pelaksanaan program IPDMIP

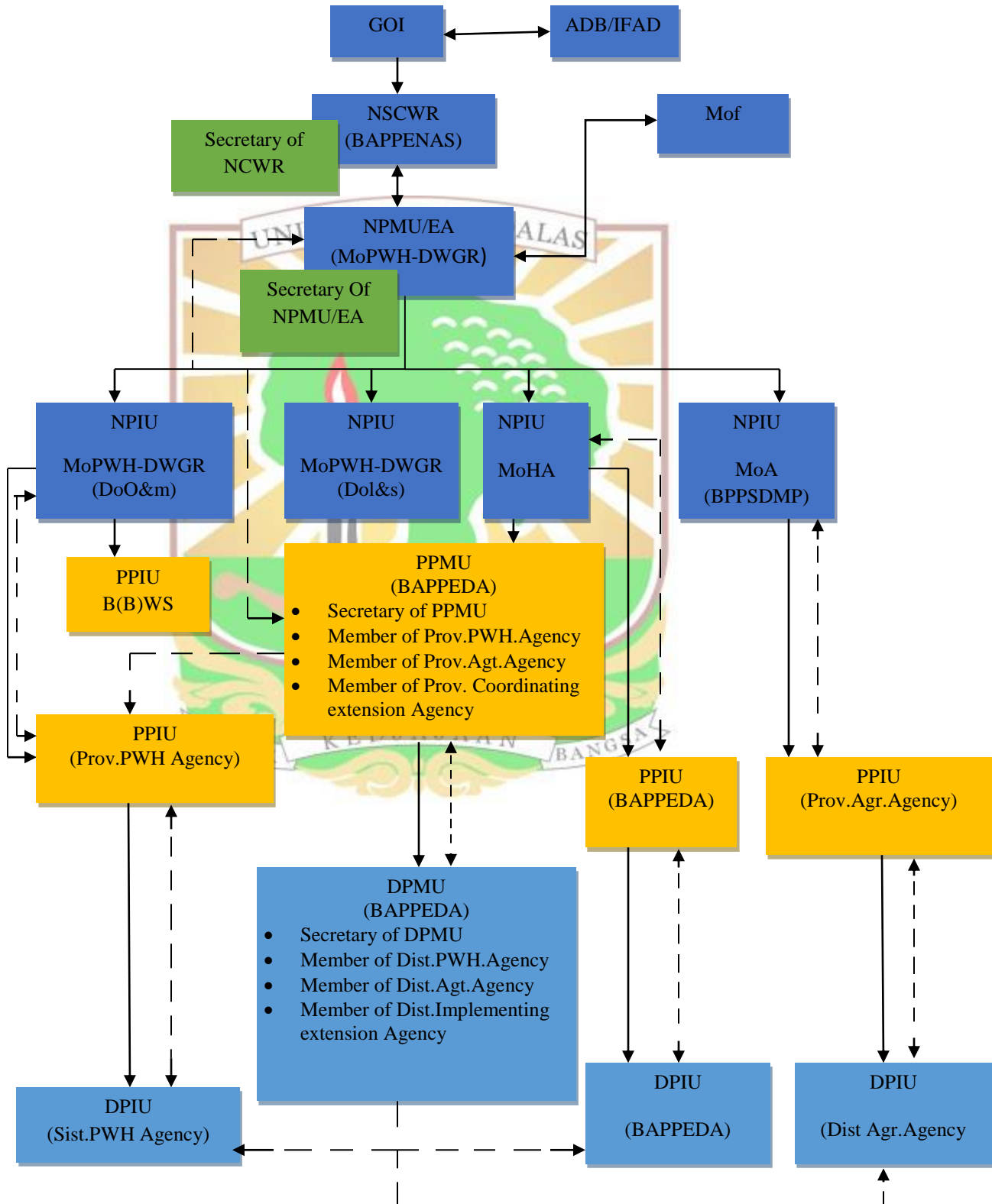
⁵Sukino, Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013, hlm. 64

Nasional) 2020-2024 ketahanan sumberdaya air dan ketahanan pangan menjadi prioritas. Untuk mencapai tujuan ini, akan dilaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) melalui peningkatan sistem pengelolaan irigasi, penguatan P3A, penguatan Lembaga Pengelola Irigasi serta rehabilitasi 3 juta ha daerah irigasi.

Pelaksanaan Program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) terdiri atas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Deputi Sarana Dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian/BPPSDM Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota Lokasi Pelaksanaan IPDMIP. Berikut secara ringkas struktur organisasi pelaksana program IPDMIP dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dapat dilihat pada struktur dibawah ini:

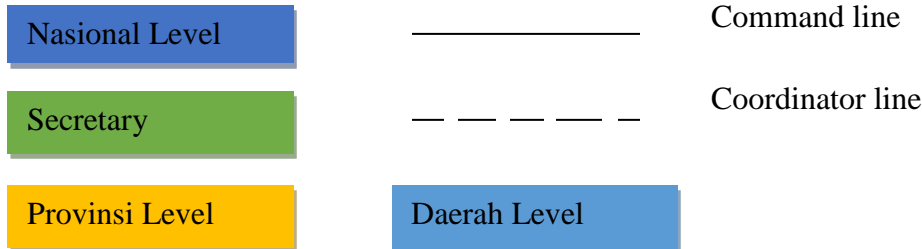


Struktur Organisasi IPDMIP



Sumber: Pedoman Pelaksanaan IPDMIP

Tahun 2018



Struktur IPDMIP *International Funds for Agricultural Development* (IFAD) dan *Asian Development Bank* (ADB) telah bekerja sama untuk mendukung program pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terintegrasi IPDMIP dan telah bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia/*Government Of Indonesia* (GOI) seluruh kegiatan IPDMIP diarahkan oleh NSCWR (*National Steering Committee For Water Resources*) selaku wadah koordinasi di tingkat pusat yang dibentuk oleh kepala BAPPENAS. NMPU (*National Program Management Unit*) selaku Executing Agency (EA) harus melakukan fungsi koordinasi dan sinkronisasi seluruh kegiatan IPDMIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang berkedudukan di Direktorat PJSDA, Kementerian PUPR, NMPU dibantu oleh sekretariat NPMU dibentuk dengan surat keputusan Sekretaris Jendral Kementerian PUPR atas nama Menteri, sedangkan Sekretariat NPMU dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Pengembangan Sumber Daya Air. NPIU (*National Project Implementing Unit*) yaitu pelaksanaan program IPDMIP pada tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Ministry of Finance (MoF), Kementerian Keuangan/Ministry of Home Affairs (MoHA), Kementerian PUPR/Ministry of Public

Works And Housing (MoPWH), dan Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture (MoA).

Provincial Management Unit (PPMU) yang akan dibentuk di bawah BAPPEDA tingkat Provinsi yang akan melaksanakan pada tingkat provinsi yang akan berfungsi untuk melaksanakan koordinasi antar instansi terkait pada tingkat Provinsi program PPMU akan dibantu oleh secretariat PPMU yang berkedudukan di BAPPEDA Provinsi tanggung jawab meriview AWP Provinsi dan Kabupaten bersama dengan PPIU, KPMU, dan KPIU. Dan Pada tingkat daerah atau kabupaten dibentuk DPMU (*District Project Management Unit*) dibawah BAPPEDA Kabupaten yang berfungsi sebagai *memonitoring review* dan mengkoordinasikan pelaksanaan program IPDMIP di Kabupaten. Implementasi program IPDMIP kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh DPIU (*District Project Implementing Unit*) akan dipimpin masing-masing oleh kepala lembaga tingkat provinsi dan Kabupaten yang relevan seperti Dinas PU dan Dinas Pertanian.

Program IPDMIP dirancang untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia untuk mencapai target Swasembada, prioritas Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui: (a) revitalisasi penyuluhan pertanian dan produksi benih (b) peningkatan irigasi melalui rehabilitasi bendungan-bendungan utama dan 3 juta ha jaringan irigasi (c) pengelolaan irigasi yang lebih baik (d) peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi (d) penerapan pengelolaan irigasi partisipatif di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (e) pembangunan 1 juta ha jaringan irigasi baru di luar Jawa dan Bali dan (f)

pembangunan waduk-waduk besar di wilayah hulu⁶. Periode pelaksanaan IPDMIP sudah dilaksanakan dari tahun 2017-2022, Program IPDMIP terdiri atas:

1. Komponen 1 penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Irigasi Pertanian dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, BAPPENAS, dan Kementerian Dalam Negeri di tingkat Nasional dan badan-badan perencanaan Provinsi/Kabupaten (BAPPEDA) di tingkat daerah. Komponen ini fokus pada: (a) penguatan kapasitas lembaga dan staf pemerintah; dan (b) dukungan bagi unit manajemen dan implementasi di tingkat nasional dan daerah untuk melakukan pengawasan program. Peningkatan koordinasi di antara berbagai instansi pemerintah merupakan elemen yang penting dari Komponen ini.
2. Komponen 2 perbaikan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri. Komponen ini memperkuat penyaluran air irigasi di tingkat daerah irigasi.
3. Komponen 3 perbaikan infrastruktur irigasi peningkatan infrastruktur irigasi, dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Merupakan komponen terbesar yang memanfaatkan sekitar 60% dari keseluruhan dana Program. Komponen ini mendukung rehabilitasi dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder serta infrastruktur drainase.
4. Komponen 4 peningkatan pendapatan pertanian irigasi, dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan IFAD. Komponen ini memiliki sasaran untuk meningkatkan pertanian dan sistem

⁶Petunjuk pelaksanaan IPDMIP revisi tahun 2018

pasar untuk padi dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi. Komponen ini sub-komponennya sebagai berikut:

- a) pengembangan sumber daya manusia untuk layanan penyuluhan dan petani
- b) mobilisasi kelompok simpan-pinjam petani, pelatihan dan pembiayaan
- c) peningkatan produksi dan distribusi benih padi
- d) literasi keuangan, rantai nilai dan dukungan jasa keuangan.

Pada komponen 4 yaitu peningkatan pendapatan petani terdapat sub komponen 1 pengembangan sumberdaya manusia untuk layanan penyuluh dan petani, pengembangan sumber daya manusia untuk penyuluh terdiri dari perekrutan, dukungan bagi PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) baru yang sudah ada, sedangkan pengembangan sumber daya manusia kepada petani dilakukan dengan melakukan program sekolah lapang kepada kelompok tani dengan tujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian padi. Sektor pertanian masih menjadi peran yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada pedesaan. Kelompok tani merupakan salah wadah untuk dilaksanakannya Sekolah Lapang, saling belajar, dan dengan hal tersebut diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat dari yang tidak peka terhadap perkembangan teknologi menjadi lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi yang akan sangat berdampak meningkatkan produktivitas pertanian yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Cakupan wilayah program IPDMIP adalah di 74 Kabupaten di dalam 16 Provinsi di Indonesia, untuk periode tahun 2017 – 2022. Cakupan program IPDMIP adalah mendukung upaya penguatan kapasitas kelembagaan SDA, pengelola irigasi dan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan sistem irigasi dapat dilihat pada Tabel 1.1 provinsi dan kabupaten pelaksana Program IPDMIP

Tabel 1.1
Daftar Daerah Peserta IPDMIP

No.	Provinsi	Kabupaten
1	Aceh	(1) Aceh Timur, (2) Aceh Besar, (3) Aceh Utara dan (4) Bireuen
2	Sumatera Utara	(5) Asahan, (6) Simalungun, (7) Tapanuli Tengah, dan (8) Humbang Hasundutan
3	Sumatera Barat	(9) Pasaman, (10) Limapuluh Koto, (11) Sijunjung, (12) Pasaman Barat dan (13) Pesisir Selatan
4	Sumatera Selatan	(14) Musi Rawas, (15) Empat Lawang, (16) OKU Selatan, (17) Musi Banyuasin, (18) Banyuasin, (19) Muara Enim dan (20) Lahat
5	Lampung	(21) Pesawaran, (22) Tulangbawang, (23) Tanggamus, (24) Lampung Tengah, dan (25) Mesuji
6	Banten	(26) Pandeglang, dan (27) Serang
7	Jawa Barat	(28) Sumedang (29) Indramayu, (30) Garut, (31) Kuningan, (32) Ciamis, (33) Sukabumi, dan (34) Majalengka
8	Jawa Tengah	(35) Kebumen, (36) Banjarnegara, (37) Pati, (38) Purworejo, (39) Pekalongan, (40) Banyumas dan (41) Cilacap
9	Jawa Timur	(42) Jombang, (43) Bojonegoro, (44) Ngawi, (45) Lamongan, (46) Kediri, (47) Madiun, (48) Lumajang, (49) Jember dan (50) Tuban
10	Kalimantan Barat	(51) Sambas, (52) Kayong Utara, (53) Ketapang, dan (54)

		Kubu Raya
11	Kalimantan Selatan	(55) Tanah Bumbu, (56) Hulu Sungai Tengah, (57) Tapin, dan (58) Barito Kuala
12	Sulawesi Utara	(59) Minahasa Selatan, dan (60) Bolaang Mongondow
13	Sulawesi Tengah	(61) Toli-Toli, (62) Poso, dan (63) Banggai
14	Sulawesi Selatan	(64) Wajo, (65) Pinrang, (66) Sidenreng Rappang, (67) Soppeng dan (68) Bone
15	Nusa Tenggara Barat (NTB)	(69) Lombok Timur, (70) Bima, (71) Lombok Tengah, dan (72) Dompu
16	Nusa Tenggara Timur (NTT)	(73) Manggarai Timur dan (74) Manggarai Barat

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program IPDMIP tahun 2019 revisi 1 Tahun 2018

Sumatera Barat daerahnya yang mempunyai demografi yang didominasi oleh bentangan bukit, pegunungan yang membuat daerah di Sumatera Barat ini cenderung masyarakatnya bergantung hidup pada sektor pertanian. Lebih dari 50% atau tepatnya 50,84 % penduduk Sumatera Barat bergantung pada usaha pertanian pada tahun 2018, disimpulkan dari hasil survei pertanian antar sensus (Sutas) 2018 yang dirilis di Badan Pusat Statistik (BPS) padatahun 2019⁷. Dan dengan itu hasil pertanian di Sumatera Barat cukup tinggi dan menjadi lumbung padi di Indonesia. Pada tahun 2019 Sumatera Barat berhasil menepatkan pada posisi 9 dari 10 Provinsi menjadi lumbung padi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Provinsi sebagai Lumbung Padi Indonesia Tahun 2019

NO	Provinsi	Luas lahan	produksi padi	Produksi beras
1.	Jawa Tengah	1.678.479 Ha	9.655.653 ton	5.539.448 ton

⁷ Mata Pencarian Penduduk Sumatera Barat <https://langgam.id/50-persen-penduduk-sumbar-bergantung-pada-pertanian/> diaskes 5 september 2020, 10:34 PM

2.	Jawa Timur	1.702.426 Ha	9.580.933,88 ton	5.496.581 ton
3.	Jawa Barat	1.578.835 Ha	9.084.957 ton	5.212.039 ton
4.	Sulawesi Selatan	1.010.188 Ha	5.054.166 ton	2.899.575 ton
5.	Sumatera Selatan	539.316 Ha	2.603.396 ton	1.493.568 ton
6.	Lampung	464.103 Ha	2.164.089 ton	1.241.538 ton
7.	Sumatera Utara	413.141 Ha	2.078.901 ton	1.192.665 ton
8.	Aceh	310.012 Ha	1.714.437 ton	983.572 ton
9.	Sumatera Barat	311.671 Ha	1.482.996 ton	850.794 ton
10.	Banten	303.731 Ha	1.470.503 ton	843.627 ton

Sumber: BPS menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2019

Dari Tabel 1.2 Sumatera Barat pada tahun 2019 sebagai bagian dari lumbung padi di Indonesia yang dilihat dari hasil produktivitas pertaniannya sudah dapat dikatakan cukup berhasil, dan menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan program IPDMIP dari 16 provinsi yang melaksanakan program IPDMIP melalui program IPDMIP yang dilaksanakan di Sumatera Barat diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pemberian ilmu pengetahuan baru dan penerapan teknologi di bidang pertanian sehingga dapat berdampak meningkatnya produktivitas pertanian masyarakat Sumatera Barat.

Pelaksanaan program IPDMIP Sumatera Barat terdapat 5 Kabupaten yang melaksanakan program IPDMIP tersebut di antara-Nya sebagai berikut pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Luas Panen Padi Kabupaten yang Melaksanakan Program IPDMIP
Tahun 2018-2019

Kab/Kota	2018	2019
----------	------	------

	Luas Panen (Hektar)	Luas Panen (Hektar)
Kab. Pesisir Selatan	37.221,01	39.205,89
Kab. Lima Puluh Kota	34.704,10	32.621,23
Kab. Pasaman	32.259,42	34.261,23
Kab. Sijunjung	15.437,28	14.795,81
Kab. PasamanBarat	10.537,38	9.309,02

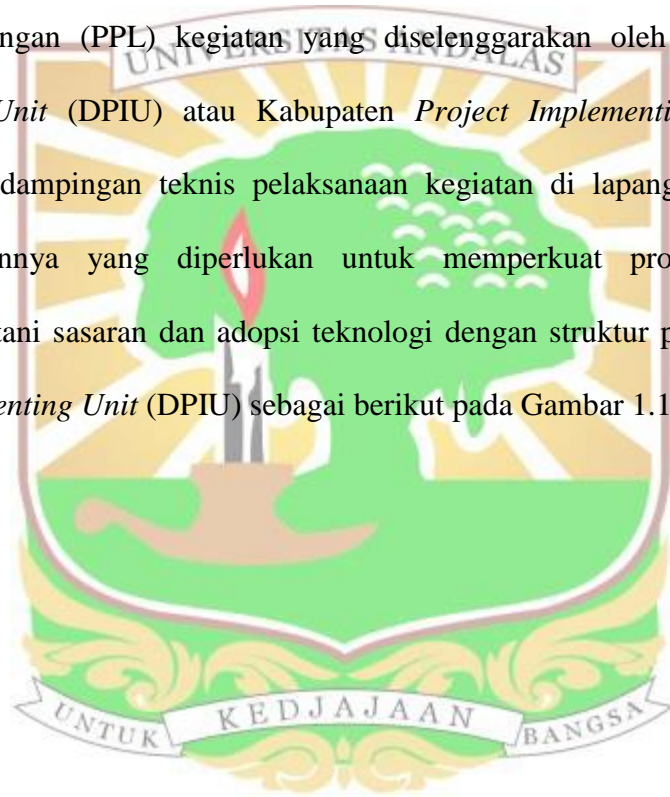
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Dari Tabel 1.3 di atas dari ke-5 Kabupaten yang melaksanakan program IPDMIP berdasarkan luas panen padi Kabupaten-kabupaten yang melaksanakan program IPDMIP Kabupaten yang paling tinggi luas panennya yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, namun dilihat dari peningkatan luas panen pada tahun 2018, 2019 Kabupaten yang melaksanakan Program IPDMIP, Kabupaten yang peningkatannya paling tinggi yaitu Kabupaten Pasaman dengan selisih peningkatan 2.001,81 Hektar, pada urutan kedua yaitu Kabupaten Pesisir Selatan 1.984,88 Hektar hanya 2 Kabupaten yang mengalami peningkatan luas panen, Kabupaten lainnya mengalami penurunan luas panen yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman.

Oleh karena itu peneliti lebih fokus pada pelaksanaan program IPDMIP di Kabupaten Pasaman dan hal lain yang menarik bahwa Kabupaten Pasaman berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pada sektor pertanian yang termasuk dalam RPJMD Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021 bahwa struktur perekonomian Kabupaten Pasaman periode 2016-2021 masih di dominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, pariwisata. Sehingga sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pasaman untuk itu

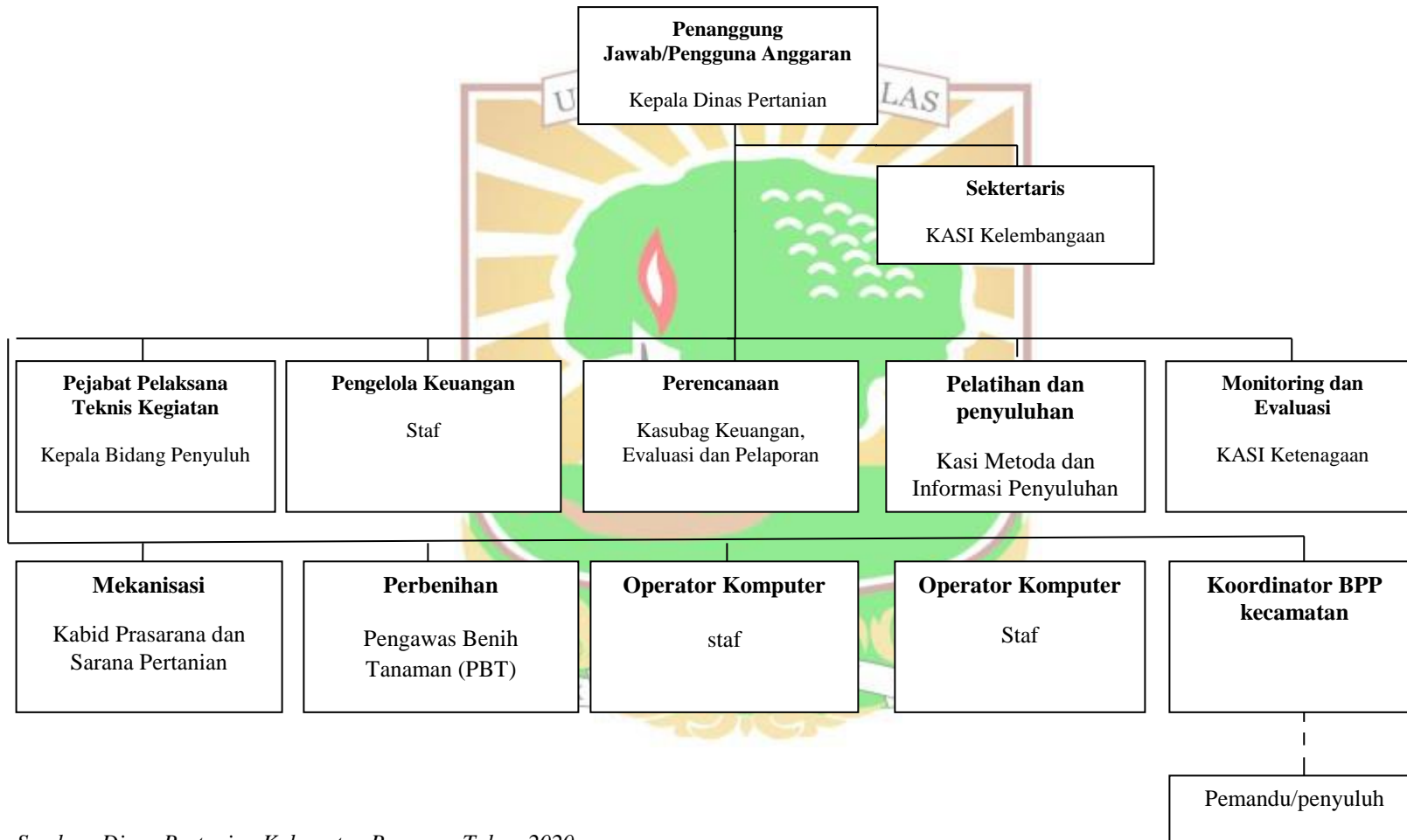
perlu peningkatan nilai tambah produk sehingga dapat meningkatkan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)⁸.

Peningkatan produksi pertanian merupakan salah tujuan dari pelaksanaan program IPDMIP yang salah satu kegiatannya yaitu peningkatan sumber daya manusia petani melalui sekolah lapang IPDMIP, sebelum pelaksanaan sekolah lapang maka terlebih dahulu akan dilakukannya pemilihan dan pelatihan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kegiatan yang diselenggarakan oleh *District Project Implementing Unit* (DPIU) atau Kabupaten *Project Implementing Unit* (KPIU) merupakan pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan dan kegiatan pendukung lainnya yang diperlukan untuk memperkuat proses peningkatan kemampuan petani sasaran dan adopsi teknologi dengan struktur pelaksana *District Project Implementing Unit* (DPIU) sebagai berikut pada Gambar 1.1



⁸ Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman

Gambar 1.1
Struktur Pelaksana District Project Implementing Unit (DPIU)



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 1.1 merupakan struktur pelaksana IPDMIP di kabupaten *District Project Implementing Unit (DPIU)* atau *Kabupaten Project Implementing Unit (KPIU)* sebagai penanggung jawab pelaksanaan sekolah lapang IPDMIP yaitu Kepala Dinas Pertanian yang bertugas memimpin dan mengorganisasikan dan memberikan bimbingan terhadap tim untuk kelancaran pelaksanaan Program IPDMIP. Sekretaris bertugas untuk menghimpun dan mendokumentasikan data kearsipan pelaksanaan Program IPDMIP. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas untuk Menjamin bahwa Rekening Khusus Daerah dibuka secepatnya dan digunakan sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama antara IFAD, ADB, dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembayaran dan aplikasi penarikan dana yang tepat waktu, Menyiapkan dukungan administratif dan logistik bagi KPIU. Pengelola keuangan bertugas untuk melaksanakan Penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan dan dokumen keuangan pelaksanaan Program IPDMIP. Memonitor dan evaluasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Program IPDMIP. Pelatihan dan Penyuluhan bertugas untuk mengorganisasikan kegiatan pelaksanaan pelatihan penyuluhan dan nutrisi. Pembenuhan bertugas untuk mengorganisasikan kegiatan pembenuhan. Mekanisasi bertugas untuk mengelola mekanisasi bagi sasaran proyek. Koordinator BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan dalam Sekolah Lapang IPDMIP bertindak pengawas pelaksanaan program IPDMIP pada tingkat Kecamatan. *Supervisor* yang akan mengawasi jalannya Sekolah Lapang IPDMIP di Lapangan. Sebelum pelaksanaan Sekolah Lapang kepada petani hal yang pertama dilakukan yaitu memilih dan melakukan pelatihan kepada pemandu yang akan memberikan pelatihan kepada kelompok tani,

Pelaksanaan Sekolah Lapang IPDMIP pada tahun 2018 dilaksanakan oleh 41 unit Sekolah Lapang IPDMIP di daerah irigasi kewenangan Kabupaten Pasaman, dan sebanyak 615 petani

menerima fasilitas Sekolah Lapang IPDMIP. Pada tahun 2019 Kelompok tani yang mengikuti Sekolah Lapang menjadi berkurang menjadi 26 kelompok tani yang mengikuti Sekolah Lapang. Pelaksanaan Sekolah Lapang IPDMIP tahun 2020 mengalami pengurangan anggaran dikarenakan pandemi COVID-19 dan hanya dilaksanakan 16 Sekolah Lapang IPDMIP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasamandiantara-Nya sebagai berikut pada Tabel 1.4 :

Tabel 1.4
Lokasi Pelaksanaan Sekolah Lapang IPDMIP Daerah Irigasi Kabupaten Pasaman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Nama Daerah Irigasi	Lokasi SL	
			Nama Poktan	Nagari
1	Rao Utara	Koto Rajo	Sakato	Koto Rajo
			Siroyang maju	
2	Padang Gelugur	Batang Sontang	Wanita Tani	Sitombol
3	Lubuk Sikaping	Sawah Padang	Tunas Muda	Sundata Utara
4	Tigo Nagari	Batang Bindalik	Padang Sago	Binjai
			Jurnang	Binjai
			Saiyo	Binjai
			Sariak Sarumpun	Ladang Panjang
5	Bonjol	Aia Dareh	Pulau	Limo Koto
			Bancah	
			Balai Saiyo	
6	Duo Koto	Batang Andilan	Muara Labuah	Sp. Tonang selatan
			Mandiri Saiyo	Sp. Tonang
7	Duo Koto	Bpt. Dingin Barilas	Sahabat Bunda	Sp. Tonang Utara
8	Rao	Btg. Tingkarang	Pertemuan	Tarung-tarung Selatan
			Mulya Tani	Tarung-tarung

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Tahun 2020

Sekolah Lapang IPDMIP dilaksanakan pada 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman dengan jadwal yang sama dilakukan secara serentak namun tetap terjadi perbedaan produktivitas hasil pertanian padi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1.7 perbedaan produktivitas pertanian padi di masing-masing Kecamatan yang melaksanakan Sekolah Lapang IPDMIP sebagai berikut:

Tabel 1.5
Produksi Padi Kecamatan yang Melaksanakan Sekolah Lapang IPDMIP 2018- 2019

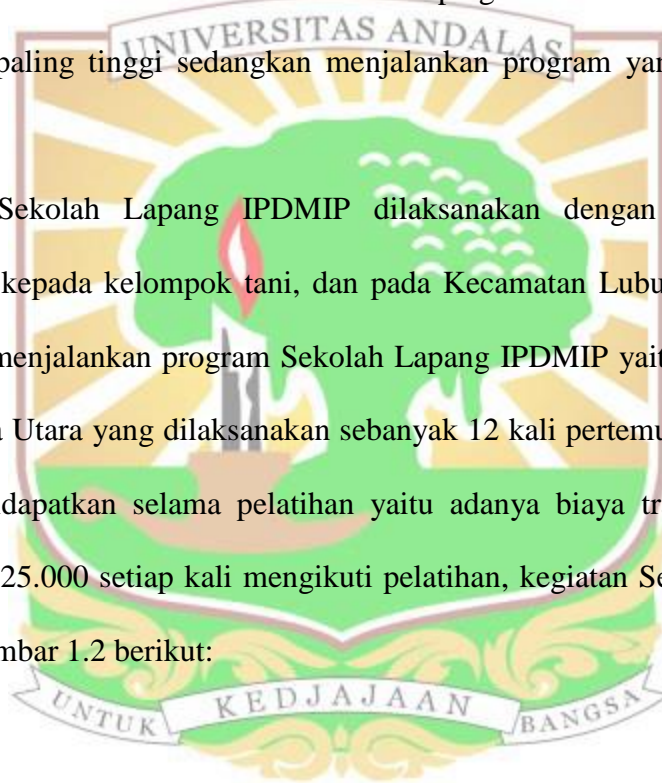
No	Kecamatan	Jumlah kenagarian	Daftar kenagarian	Jumlah Produksi Padi Th.2018 (Ton)	Jumlah Produksi Padi Th.2019 (Ton)
1	Padang Gelugur	4	Bahagia Padang Gelugua, Padang Gelugur, Sitombol Padang Gelugua, sontang Cubadak	31.374	30.833
2	Lubuk Sikaping	6	Aia Manggih, Durian Tinggi, Jambak, Pauah, Sundata, Tanjung Beringin	24.050	19.697
3	Tigo Nagari	3	Binjai, Ladang Panjang, Malampah	19.282	14.931
4	Rao Utara	3	Koto Nopan, Koto Rajo, Languang, Lubuak Gadang	11.852	14.439
5	Bonjol	4	Ganggo Hilia, Ganggo Mudiak, Koto Kaciak, Limo Koto	12.970	13.622
6	Duo Koto	2	Cubadak, Simpang Tonang	12.384	13.460

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Tahun 2020

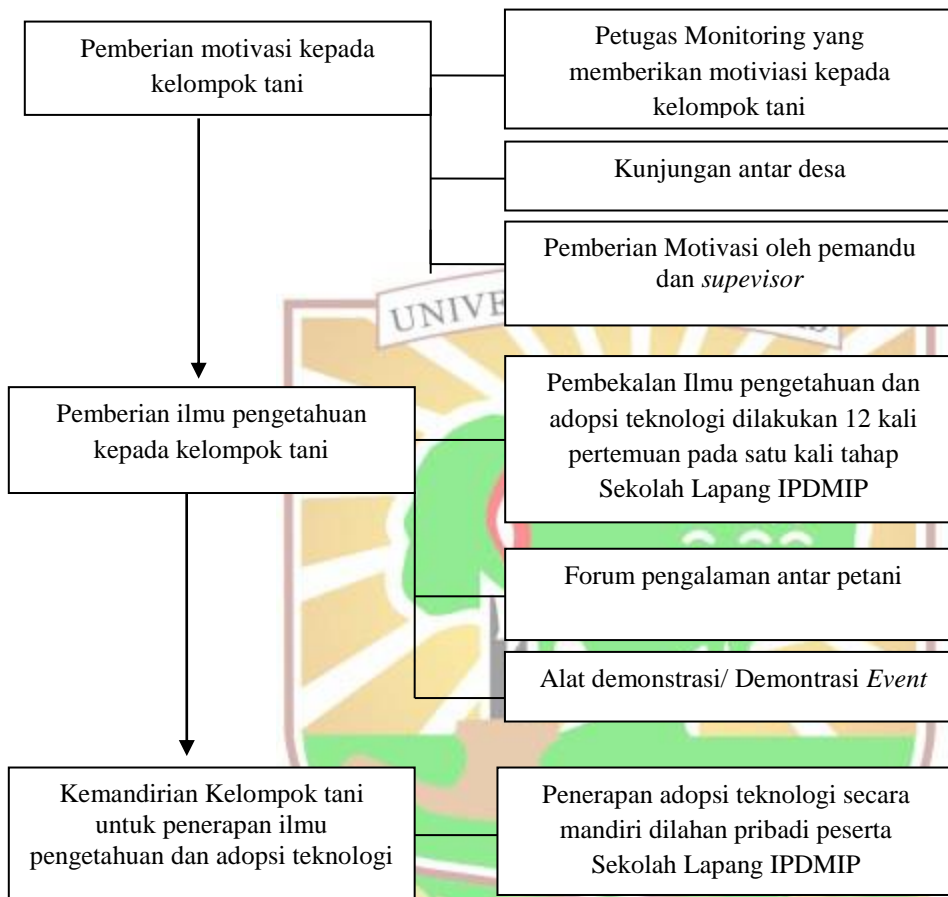
Dari Tabel 1.7 dapat dilihat Produksi pertanian padi di Kecamatan-kecamatan yang melaksanakan program IPDMIP di Kabupaten Pasaman tahun 2018-2019 pada umumnya

terjadinya penurunan produksi pertanian namun juga ada beberapa Kecamatan yang produksi pertaniannya meningkat, Kecamatan yang mengalami penurunan produksi di antaranya yaitu Kecamatan Padang Gelugur, Tigo Nagari, Lubuk Sikaping. Dilihat dari selisih penurunan produksi pertanian padi kecamatan yang paling tinggi penurunan produksi pertaniannya yaitu kecamatan Lubuk Sikaping dengan selisih penurunan 4.353 Ha, Kecamatan Tigo Nagari dengan selisih penurunan 4.351 Ha, Kecamatan Padang Gelugur 544 Ha. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Lubuk Sikaping karena Kecamatan Lubuk Sikaping penurunan produksi paling tinggi sedangkan menjalankan program yang sama yaitu program IPDMIP.

Pelaksanaan Sekolah Lapang IPDMIP dilaksanakan dengan memberdayakan atau melakukan pelatihan kepada kelompok tani, dan pada Kecamatan Lubuk Sikaping tahun 2020 kelompok tani yang menjalankan program Sekolah Lapang IPDMIP yaitu kelompok tani Tunas Muda Nagari Sundata Utara yang dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan selama 6 bulan, dan fasilitas lain yang didapatkan selama pelatihan yaitu adanya biaya transportasi bagi peserta pelatihan sebesar Rp 25.000 setiap kali mengikuti pelatihan, kegiatan Sekolah Lapang IPDMIP dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2 Kegiatan Sekolah Lapang IPDMIP



Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2021

Dari Gambar 1.2 kegiatan Sekolah Lapang IPDMIP yang telah dilaksanakan pada tahun 2018-2019, namun pada tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada proses pemberdayaannya di antara seperti kunjungan antar desa, kunjungan antar desa tidak dilaksanakan pada tahun 2020 karena kendala pandemi COVID-19.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan fenomena-fenomena yang terjadi pada pemberdayaan petani melalui Sekolah Lapang IPDMIP tahun 2020 berdasarkan teori dari Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho dengan tiga tahap pemberdayaan, yaitu tahap penyadaran,

tahap pengkapsitasan, tahap pendayaan. Pada tahap penyadaran pada Sekolah Lapang IPDMIP yang dilaksanakan cenderung dilakukan pada tahun 2018 dan 2019 dilaksankannya kunjungan antar desa yang bertujuan untuk dapat memotivasi kelompok sasaran dengan melihat adopsi teknologi yang digunakan pada desa lainnya dalam meningkatkan produksi padi, dan secara perlahan dengan adanya kunjungan antar desa dapat merubah pola pikir masyarakat yang melihat secara langsung adopsi teknologi yang digunakan kelompok lain sehingga dengan hal tersebut dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk terus berkembang dan belajar lebih baik lagi, namun pelaksanaan Sekolah Lapang pada tahun 2020 hal ini tidak dilakukan. pemberian motivasi/dorongan cenderung dilakukan oleh pemandu dan *supervisor* dengan cara setiap pertemuan/pelatihan yang dilakukan adanya proses dorongan dari pemandu dan *supervisor* kepada kelompok tani untuk terus bergerak maju sehingga *outputnya* produksi pertanian setelah Sekolah Lapang IPDMIP ini dapat meningkat.

Pemberian motivasi kepada kelompok tani juga dilakukan oleh petugas *monitoring* pada saat Sekolah Lapang dilaksanakan. Dengan terjadinya perbedaan kegiatan Sekolah Lapang IPDMIP yang dilaksanakan dengan tahun sebelumnya tentu terjadi perbedaan *output* dari pelaksanaan Sekolah Lapang IPDMIP hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk melihat lebih dalam lagi.

Sekolah Lapang IPDMIP sebelum dilaksanakan secara rutin maka akan dilaksanakan ‘‘Rembug Tani’’ untuk menentukan kesepakatan antara petani dengan Dinas Pertanian atau biasa disebut kontrak Sekolah Lapang IPDMIP hal ini bertujuan agar tidak terjadi pemahaman antara kelompok tani dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman, kontrak Sekolah Lapang IPDMIP diantaranya yaitu materi yang akan diberikan, kesepakatan kehadiran, fasilitas apa yang

didapatkan, sehingga dengan adanya kontrak Sekolah Lapang IPDMIP meminimalisir ketidakhadiran peserta pelatihan.

“awal pelaksanaan Sekolah Lapang IPDMIP akan dilakukan rembuk tani untuk menghindari tidak hadirnya petani saat pelaksanaan Sekolah Lapang IPDMI, dan hal ini sepertinya cukup efektif dilihat dari absen kehadirannya hanya beberapa orang yang tidak hadir kalau dalam hitungan % sekitar 80% petani tersebut hadir pada Sekolah Lapang IPDMIP dilaksanakan” (Hasil wawancara dengan pemandu Intan Utari 5 Februari 2021, hari Jumat jam 15.00 WIB)

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan pemandu yaitu Intan Utari partisipasi kelompok tani dalam pelaksanaan Sekolah Lapang IPDMIP cukup besar yaitu sekitar 80% yang hadir minimal pada saat pelaksanaan Sekolah Lapang dilaksanakan, dengan kehadiran yang cukup banyak pada saat pelatihan Sekolah Lapang IPDMIP di laksanakan tentu akan berdampak pada *output* setelah Sekolah Lapang IPDMIP di laksanakan, apakah mampu untuk merubah pola pikir masyarakat dengan adopsi teknologi yang digunakan pada Sekolah Lapang IPDMIP.

Pemandu memberikan ilmu pengetahuan atau teknologi baru dalam proses pemberdayaan Sekolah Lapang IPDMIP yaitu selama 12 kali pertemuan pada satu tahap sekolah lapang ini materi atau ilmu pengetahuan yang diberikan berbeda-beda tapi tetapi berkesinambungan sehingga setelah proses Sekolah Lapang IPDMIP ini pengetahuan masyarakat dapat meningkat dan diharapkan masyarakat dapat mampu mengatasi permasalahan yang muncul seperti hama yang timbul dan solusi untuk mengatasi hal tersebut, sehingga *output* dari dilaksanakannya sekolah lapang ini dapat meningkatkan produksi pertanian padi masyarakat di Nagari Sundata tahun 2020. Selain memberikan pelatihan selama 12 kali pertemuan untuk melakukan pelatihan kepada petani di saat pemberdayaan diberikan kepada kelompok sasaran petani diberikan ruang untuk berdiskusi dalam rangka berbagi pengalaman antar petani dengan kegiatan forum antar petani dengan kegiatan ini diharapkan untuk menambah wawasan petani tidak hanya dengan pelatihan tapi juga didapatkan antar sama-sama petani. Namun pada tahun 2020

dikarenakan pandemi COVID-19 forum berbagi pengalaman antar petani tidak dilaksanakan sehingga tidak dilaksanakannya ini tentu akan berdampak terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan di banding dengan tahun sebelumnya.

Sekolah Lapang IPDMIP dilaksanakan melalui kelompok tani atau gabungan dari kelompok tani yaitu GAPOKTAN, namun pada Sekolah Lapang IPDMIP tahun 2020 di Kecamatan Lubuk Sikaping Sekolah Lapang IPDMIP hanya untuk satu kelompok yaitu kelompok tani Tunas Muda yang beranggotakan 28 orang, namun untuk yang mengikuti Sekolah Lapang IPDMIP hanya untuk 18 orang anggota kelompok tani.

Cara lain untuk dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani yaitu dengan diadakannya perhelatan demonstrasi atau demonstrasi *event*, demonstrasi *event* dilakukan untuk dapat mengenalkan secara lebih detail kepada kelompok tani tentang penggunaan adopsi teknologi yang digunakan demonstrasi *event* terbagi 2 yaitu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui pemandu dan dilaksanakan melalui pihak ketiga yaitu swasta, namun pada tahun 2020 hanya satu yang dilaksanakan yaitu demonstrasi *event* yang dilakukan oleh pemandu dan *supervisor*.

Sekolah lapang IPDMIP masyarakat diberikan kekuasaan untuk menerapkan ilmu secara mandiri yang di dapatkan selama sekolah lapang ini dilaksanakan dengan contoh pada akhir sekolah lapang dilaksanakan maka akan diberikan bantuan bibit unggul sehingga masyarakat yang mengikuti Sekolah Lapang IPDMIP ini dapat langsung menerapkan ilmu yang didapatkan selama mengikuti dua tahap sekolah lapang yang mana pada satu tahap sekolah lapang ini dilaksanakan 12 kali pertemuan dan juga ada lahan percontohnya sehingga masyarakat yang mengikuti sekolah lapang dapat lebih memahami materi/ilmu yang diberikan dengan di iringi paktek secara langsung. Namun pada setelah Sekolah Lapang dilaksanakan seharusnya

masyarakat mampu untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan adopsi teknologi yang didapatkan di Sekolah Lapang IPDMIP tidak semua peserta pelatihan menerapkannya.

“Setelah Sekolah Lapang IPDMIP dilaksanakan saya sebagai penyuluh melihat bahwa hanya sekitar 50% peserta Sekolah Lapang IPDMIP menerapkan ilmu pengetahuan dan adopsi teknologi yang di dapatkan selama Sekolah Lapang IPDMIP dengan berbagai alasan seperti mereka merasa itu tidak cocok untuk kondisi lahannya atau dan juga lahannya yang dahulu tidak sama dengan lahan sekarang karena kebiasaan masyarakat di Kecamatan Lubuk Sikaping ini untuk mengolah lahan tersebut dilakukan secara bergantian sehingga tidak semua masyarakat dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan adopsi teknologi Sekolah Lapang IPDMIP dilahannya Masing-masing” (Hasil wawancara dengan pemandu Sekolah Lapang IPDMIP Intan Utari, pada tanggal 5 Februari 2021 jam 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara dengan Pemandu Intan Utari bahwa setelah Sekolah Lapang IPDMIP dilaksanakan cenderung penerapan ilmu pengetahuan dan adopsi teknologi hanya dilakukan 50% dari petani yang menerapkannya dengan berbagai alasan, hal ini menjadi satu hal yang menarik bagi peneliti, karena seharusnya para peserta Sekolah Lapang IPDMIP menerapkannya pada lahan masing-masing sedangkan hanya 50% yang mencapai tahap kemandirian untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan adopsi teknologi pada Sekolah Lapang IPDMIP

Gambar 1.3
Pelaksanaan Sekolah Lapang IPDMIP Tahun 2020



Sumber : Hasil Observasi Peneliti Tahun 2020

Hal yang menarik jika melakukan penelitian mengenai Sekolah Lapang IPDMIP pada tahun 2020 tepatnya dilaksanakan Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman hanya satu nagari yaitu Nagari Sundata Utara saja yang mengikuti program Sekolah Lapang IPDMIP ini di kecamatan Lubuk Sikaping, sehingga akan lebih mudah melihat bahwa apakah program pemberdayaan melalui Sekolah Lapang IPDMIP ini benar-benar mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat ataupun produktivitas pertanian, dan penelitian tentang Sekolah Lapang IPDMIP ini masih tergolong baru dan masih belum banyak yang melakukan penelitian ini, berdasarkan fenomena-fenomena yang peneliti kemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pemberdayaan petani diberikan kepada kelompok petani sehingga dapat meningkatkan pengetahuan kelompok sasaran, perubahan pola pikir masyarakat adopsi teknologi yang digunakan sehingga *output*-nya dapat meningkatkan hasil produktivitas pertanian padi melalui kelompok petani dengan Sekolah Lapang IPDMIP yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Pemberdayaan Petani melalui Sekolah Lapang IPDMIP Tahun 2020 di Kecamatan Lubuk Sikaping? Kabupaten Pasaman?”**

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tahap-tahapan pemberdayaan petani melalui Sekolah Lapang IPDMIP Tahun 2020 Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampumemberikan tambahan wawasan mengenai pemberdayaan Sekolah Lapang IPDMIP
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Administrasi Pembangunan terutama tentang pemberdayaan masyarakat, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada studi tentang pemberdayaan masyarakat melalui Sekolah Lapang IPDMIP.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat terkhusus tentang Sekolah Lapang IPDMIP.

